Materi 13

Materi 1: Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa barat

1. Perluasaan penggunaan hutan

Perkebunan di Indonesia telah berkembang sebelum masa penjajahan. Bangsa kalian telah memiliki teknologi turun temurun untuk mengembangkan berbagai teknologi pertanian. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga melibatkan perusahaan. Saluran Irigasi BK 10 di Sumsel peninggalan masa Hindia Belanda Pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, banyak perusahaan asing yang menanamkan investasi di Indonesia. Saluran irigasi Bendung Komering 10 (BK 10) di Desa Gumawang, Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur, Sumatra Selatan. Saluran tersebut dibangun sejak masa Hindia Belanda. Daerah OKU Timur yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Sepanjang aliran irigasi tersebut menjadi lumbung padi Sumatra Selatan hingga sekarang.

1. Persebaran penduduk dan urbanisasi

Sejarah transmigrasi Indonesia terutama terjadi pada akhir abad XIX. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga murah di berbagai perkebunan Sumatra dan Kalimantan. Bagi kamu yang tinggal di beberapa daerah di Sumatra, mungkin dapat menelusuri sejarah keluargamu atau teman-temanmu. Mungkin sebagian dari mereka memiliki garis keturunan dari Jawa. Pembukaan perkebunan pada masa Kolonial Barat di Indonesia telah berhasil mendorong persebaran penduduk Indonesia. Persebaran penduduk yang pada umumnya dari Jawa ke luar Jawa, hingga sekarang di samping memiliki dampak sosial juga memiliki dampak ekonomi yang positif. Semula tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga murah di berbagai perkebunan Sumatra dan Kalimantan, namun sekarang sebagian besar transmigran tidak lagi menjadi tenaga kerja murah tetapi berbalik menjadi majikan. Mereka dapat menggarap lahan dengan tanaman yang produktif seperti kelapa sawit, coklat, kopi, dan lain sebagainya. Dari aktivitas tersebut mereka dapat meningkatkan kondisi ekonominya. Di samping itu hasil produksi mereka telah dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak hanya masyarakat di lingkungan sekitar, namun sudah menjadi komoditas ekspor. Munculnya berbagai pusat industri dan perkembangan berbagai fasilitas di kota menjadi daya dorong terjadinya urbanisasi. Urbanisasi terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia. Daerah yang awalnya hutan belantara menjadi ramai dan gemerlap karena ditemukan tambang.

1. Pengenalan tanaman baru

Pengaruh pemerintah Kolonial Barat dalam satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia.

1. Penemuan tambang-tambang

Pembukaan lahan pada masa Kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad XIX dan awal abad XX.

1. Transportasi dan komunikasi

Pada zaman penjajahan Belanda banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. Kamu tentu masih ingat bagaimana proses pembangunan jalur Anyer Panarukan yang dibangun pada masa Pemerintah Daendels. Satu sisi pembangunan tersebut menimbulkan kesengsaraan rakyat, terutama akibat kerja paksa. Di sisi lain pembangunan jalur tersebut telah mempermudah jalur transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Pembangunan rel kereta api juga dilakukan di berbagai daerah Jawa dan Sumatra.

1. Perkembangan kegiatan ekonomi

Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa pemerintah kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang bukan hanya untuk dipanen semusim. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda. Sebagai contoh munculnya kuli-kuli perkebunan, mandor dan administrasi di berbagai perusahaan pemerintah maupun swasta. Kegiatan ekspor-impor juga mengalami kenaikan signifikan pada masa pemerintah Kolonial Barat. Hal ini tidak lepas dari usaha pemerintah kolonial menggenjot jumlah ekspor. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi mengalami perkembangan, dilihat dari kualitas proses produksi dari tradisional ke teknologi modern. Dilihat dari hasil produksinya terlihat ada peningkatan kualitas. Dilihat dari distribusi juga mengalami perkembangan, hal ini terlihat dari aktivitas distribusi yang pada awalnya hanya dilakukan antar daerah kemudian meningkat menjadi antar negara. Hal ini tampak dari peningkatan aktivitas ekspor-impornya. Sedangkan dilihat dari aktivitas konsumsi, masyarakat dapat menikmati hasil produksi dengan kualitas yang lebih baik.

1. Mengenal uang

Untuk memahami perubahan masyarakat Indonesia di masa penjajahan, dapat dilihat dari perubahan penggunaan uang sebagai sarana tukar menukar. Pada masa sebelum kedatangan Bangsa-bangsa Barat, biasanya masyarakat melaksanakan aktivitas sehari hari secara bergotong royong. Misalnya dalam mengerjakan sawah, setiap kelompok penduduk akan mengerjakan secara bersama dari sawah satu ke sawah lainnya. Pada masa pemerintah Kolonial Barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Sejarah terbentuknya uang sebagai berikut:

1. Masa sebelum barter
2. Masa barter
3. Masa uang barang
4. Masa uang
5. Mengenal sistem kredit
6. Perubahan dalam pendidikan

Pendidikan pesantren berkembang di berbagai daerah Indonesia pada masa sebelum kedatangan Bangsa Barat. Terdapat dua pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintah kolonial Barat. Pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pusat-pusat kekuasaan Belanda di Indonesia di berbagai kota di Indonesia menjadi pusat pertumbuhan berbagai sekolah di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda juga telah berkembang perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada masa pemerintahan Kolonial Barat, terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi dua golongan yakni sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi. Hal ini mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa yang berdiri di Yogyakarta merupakan salah satu pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Sekolah-sekolah yang dipelopori berbagai organisasi pergerakan nasional tumbuh pesat pada awal abad XX. Pengaruh pendidikan modern berdampak pada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. Munculnya elit intelektual menyebabkan lahirnya jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai pemerintah, dan sebagainya.

1. Perubahan dalam aspek politik

Kejayaan kerajaan-kerajaan pada masa sebelum kedatangan Bangsa Barat satu persatu mengalami kemerosotan bahkan keruntuhan. Pada masa kerajaan rakyat diperintah oleh raja yang merupakan Bangsa Indonesia. Pada pemerintah Kolonial Barat rakyat diperintah oleh bangsa asing. Kekuasaan bangsa Indonesia untuk mengatur bangsanya semakin hilang, digantikan oleh kekuasaan Bangsa Barat. Perubahan inilah yang paling penting untuk diperjuangkan. Tanpa kemerdekaan bangsa Indonesia sulit mengatur dirinya sendiri. Perubahan dalam sistem politik juga terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan baru. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati, pada masa pemerintah Kolonial Barat dikenal sistem pemerintahan Gubernur Jenderal, Residen, Bupati, dan seterusnya. Para penguasa kerajaan menjadi kehilangan kekuasaannya digantikan oleh kekuasaan pemerintah Kolonial Barat. Terbentuknya pemerintah Hindia Belanda dalam satu sisi menguntungkan bangsa Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda yang terpusat menyebabkan hubungan yang erat antara rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Muncul perasaan senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Hindia Belanda. Munculnya berbagai organisasi pergerakan nasional tidak lepas dari ikatan politik Hindia Belanda. Sebelum masa penjajahan Hindia Belanda, masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh sistem politik kerajaan. Terdapat puluhan kerajaan di berbagai daerah di Indonesia. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, berbagai daerah tersebut disatukan dalam satu identitas Hindia Belanda.

Materi 2: Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang

Jepang merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia, sekaligus sebagai daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara Sekutu. Selain itu Jepang harus menggalang kekuatan pasukannya, dan mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia.

1. Bangsa Indonesia dikuasai Jepang

Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Dilihat dari segi ekonomi, Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan pengembangan aktivitas ekonominya. Di samping sebagai penyedia bahan baku, Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara Sekutu. Bahkan dampaknya hingga sekarang, Indonesia menjadi konsumen besar bagi Jepang. Selain itu Jepang harus menggalang kekuatan pasukannya, dan mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia.

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang melakukan pembagian tiga daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni:

1. Pemerintahan Angkatan Darat (Tentara XXV) untuk Sumatra, dengan pusatnya di Bukittinggi.
2. Pemerintahan Angkatan Darat (Tentara XVI) untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta.
3. Pemerintahan Angkatan Laut (Armada Selatan II) untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa

Penjajahan Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari. Setelah menguasai Palembang, kemudian Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia (Jakarta) sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa, berhasil dikuasai oleh Jepang pada tangga l5 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang-Jawa Barat. Surat perjanjian serah terima kedua belah pihak ditandatangani oleh Letnan Jenderal Ter Poorten (Panglima Angkatan Perang Belanda) yang diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura (pimpinan pasukan Jepang). Sejak saat itu seluruh Indonesia dalam kekuasaan Jepang.

1. Kebijakan pemerintah militer Jepang

Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan berbagai cara. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan “Tiga A” (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia) untuk menarik simpati rakyat Indonesia seperti terlihat pada gambar. Selain itu Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” bersama lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Jepang hanyalah janji manis saja. Sebagai penjajah, Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahan Indonesia. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

1. Membentuk organisasi-organisasi sosial
2. Pembentukan organisasi semi militer
3. Pengerahan Romusha
4. Eksploitasi kekayaan alam
5. Strategi kaum pergerakan kemerdekaan

Beberapa sikap perjuangan bangsa Indonesia telah dilakukan untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun para tokoh pergerakan sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Bahkan para tokoh sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang sebagai “batu loncatan” untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada jaman Jepang adalah :

1. Memanfaatkan organisasi bentukan jepang
2. Gerakan bawah tanah
3. Beberapa perlawanan senjata
4. Eksploitasi sumber daya manusia dan alam

Eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa pendudukan Jepang. Misi Jepang untuk memenangkan Perang Dunia II menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis menghadapi tentara Sekutu. Lahan perkebunan yang ada pada masa Hindia Belanda merupakan lahan yang menghasilkan untuk jangka waktu lama. Sementara Jepang banyak membutuhkan banyak dukungan dalam menghadapi PD II. Sehingga Jepang menggerakkan tanaman rakyat yang mendukung Jepang dalam PD II. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan untuk mesin perang. Kesengsaraan pada masa pendudukan Jepang menyebabkan besarnya angka kematian pada masa pendudukan Jepang.

Migrasi terjadi terutama untuk mendukung perang Jepang menghadapi Sekutu. Banyak rakyat Indonesia yang ikut dalam Romusha maupun bantuan pasukan Jepang dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara untuk membantu perang Jepang. Sebagian mereka tidak kembali dan tidak diketahui nasibnya. Menurut catatan sejarah, jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri seperti ke Burma, Malaya, Vietnam, dan Mungthai/Thailand mencapai 300.000 orang. Ratusan ribu orang tersebut banyak yang tidak diketahui nasibnya setelah Perang Dunia II usai.

1. Kemunduran dalam bidang ekonomi

Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Pemutusan hubungan dengan perdagangan dunia, mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian, sehingga rakyat mengusahakan sendiri. Pakaian terbuat dari benang gono menjadi tren masyarakat masa pendudukan Jepang. Wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang menyebabkan terjadinya kemiskinan luar biasa. Pajak adalah iuran (pembayaran) wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan UU. Pajak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Di mana terdapat sistem pemerintahan pasti kemudian muncul pajak. Membayar pajak adalah wajib bagi seorang wajib pajak. pembangunan.

1. Kondisi pendidikan masyarakat

Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun, misalnya sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi macet. Pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah di Indonesia. Bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa pengantar di berbagai sekolah di Indonesia. Demikian halnya dengan bahasa Jepang, juga menjadi bahasa utama di sekolah-sekolah. Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah-sekolah mulai tingkat rendah. Para siswa harus digembleng bersemangat Jepang (Nippon Seishin). Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo (lagu kebangsaan Jepang) dan lagu-lagu lain, menghormati bendera Hinomaru, melakukan gerak badan (taiso) dan seikerei.

1. Pemaksaan budaya Jepang

Jepang berusaha “menjepangkan” Indonesia. Ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormat matahari, menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang. Pengaruh budaya ini menimbulkan pertentangan di berbagai daerah. Kamu dapat mengamati terjadinya perlawanan masyarakat pada masa pendudukan Jepang. Salah satu penyebab perlawanan adalah penolakan terhadap kebiasaan perintah menghormati matahari. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943 atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia didirikanlah Komisi (Penyempurnaan) Bahasa Indonesia. Tugas Komisi adalah menentukan istilah-istilah modern dan menyusun suatu tata bahasa normatif dan menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia.

1. Kemerdekaan bangsa Indonesia

Propaganda Jepang berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia. Dengan alasan untuk membebaskan bangsa Indonesia dan penjajahan Belanda, Jepang mulai mendapat simpati rakyat. Dengan kebijakan yang kaku dan keras, maka secara politik, organisasi pergerakan yang pernah ada sulit mengembangkan aktivitasnya. Bahkan Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa Kolonial Belanda. Hanya MIAI yang kemudian diperbolehkan hidup, karena organisasi ini dikenal sangat anti terhadap budaya Barat (Belanda). Kempetai selalu memata-matai gerak-gerik organisasi pergerakan nasional. Akibatnya muncul gerakan bawah tanah dalam pergerakan nasional. Jepang memanfaatkan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia untuk dapat memberikan dukungan, terhadap kekuasaan Jepang di Indonesia. Akibatnya timbul berbagai sikap dan kelompok di lingkungan para tokoh pergerakan nasional. Kelompok pertama adalah kelompok yang masih mau bekerjasama dengan Jepang, tetapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Para tokoh ini adalah mereka yang muncul dalam berbagai organisasi bentukan Jepang. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintah Jepang, sehingga melakukan gerakan bawah konsolidasi perjuangan pergerakan nasional tanah. Pada masa akhir pendudukan Jepang terjadi revolusi politik di Indonesia, yakni kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi momen penting perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya. Kemerdekaan telah membawa perubahan masyarakat dalam segala bidang.

Materi 3: Persiapan dan proklamasi kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Pada umumnya kemerdekaan bagi suatu bangsa dimaksudkan untuk: melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain; dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dunia internasional; mencapai tujuan nasional bangsa. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia.

1. Persiapan kemerdekaan Indonesia

Kedudukan Jepang semakin terdesak oleh Sekutu dalam Perang Dunia II di Asia Pasifik. Pusat-pusat militer strategis Jepang telah diduduki Sekutu. Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944 Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji dikemukakan dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengijinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang.

Jepang mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, Kondisi Jepang yang semakin terdesak oleh Sekutu justru menguntungkan bangsa Indonesia. Jepang akhirnya memberikan kesempatan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Proses kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut.

1. Pembentukan BPUPKI

Pada tanggal 1 Maret 1945, panglima pemerintahan di Jawa Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosokai. BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari 63 orang, di dalamnya terdapat perwakilan Cina, Arab, dan Indonesia, serta 7 orang Jepang. Pada tanggal 29 April 1945 pengurus BPUPKI dibentuk dengan ketuanya Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat.

Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pembicaraan pertama dalam persidangan adalah merumuskan dasar negara dengan mendengarkan pidato beberapa tokoh pergerakan seperti Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Sukarno. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar (UUD). Sidang ini juga membicarakan mengenai bentuk negara. Wacana yang muncul dalam persidangan mengenai bentuk negara adalah bentuk republik atau kerajaan. Pada akhirnya, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik.

BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Soepomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang UUD yang diketuai Sukarno melaporkan hasil kerja panitia yaitu:

1. Pernyataan Indonesia Merdeka.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar.
3. Batang Tubuh UUD.

Dengan demikian, Panitia Perancang UUD telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang UUD. Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, BPUPKI menyerahkan seluruh hasil kerjanya kepada Saiko Shikikan (panglima tertinggi tentara) di Jawa. Saiko Shikikan di Jawa menurut garis komando, berada di bawah Saiko Shikikan Nanpo Gun (panglima militer tertinggi untuk daerah selatan) yang bermarkas di Saigon, Vietnam.

1. Pembentukan PPKI

BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya kemudian dibubarkan. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritzu Zyumbi Inkai sebagai ganti BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Pada tanggal 9 Agustus Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional yakni Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr. Radjiman Widyodiningrat. Mereka bertiga dipanggil ke Saigon/ Dalat Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera. Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.

1. Peristiwa Rengasdengklok

Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hirosima dan Nagasaki. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Ketiga tokoh bangsa Indonesia yang dipanggil Pemerintah Jepang telah kembali ke tanah air. Para tokoh yang terus mengikuti perkembangan Perang Dunia II mempunyai ide untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu keputusan Jepang. Perbedaan pendapat sempat terjadi dalam mengambil keputusan kapan proklamasi kemerdekaan dinyatakan.Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua atau para tokoh PPKI, dengan golongan muda. Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan, sementara golongan tua menghendaki proklamasi menunggu perkembangan keputusan Jepang. Para anggota PPKI seperti Sukarno dan Hatta tetap menginginkan proklamasi dilakukan sesuai mekanisme PPKI.

Para pemuda mendesak agar Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Mereka beralasan bahwa saat itu Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Pertentangan pendapat antara golongan tua dan golongan muda inilah yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Soekarno-Hatta berada di Rengasdengklok selama satu hari penuh. Usaha dan rencana para pemuda untuk menekan kedua pemimpin bangsa Indonesia itu agar cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan tentara Jepang tidak dapat dilaksanakan. Namun, melalui pembicaraan antara Shodanco Singgih dengan Soekarno, menyatakan bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta.

Shodanco Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Soekarno kepada kawan-kawannya dan para pemimpin pemuda. Di Jakarta sedang terjadi perundingan antara Achmad Subardjo dengan Wikana. Tercapai kata sepakat, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumah kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan bahkan ia bersedia menjamin keselamatan para pemimpin bangsa Indonesia itu. Laksamana Tadashi Maeda itu, Jusuf Kunto bersedia mengantarkan Achmad Subardjo dan sekretaris pribadinya pergi menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Sebelum berangkat ke Rengasdengidok, Achmad Subardjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawanya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan itu, komandan kompi Peta Cudanco Subeno bersedia melepas Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta beserta rombongan untuk kembali ke Jakarta.

Perbedaan antara golongan tua dan golongan muda menunjukkan adanya saling menghargai antara golongan tua dan golongan muda. Walaupun golongan tua membawa paksa kedua tokoh golongan tua (Sukarno dan Hatta), namun mereka tetap menghormati kedua tokoh ini sebagai Bapak Bangsa. Keduanya tetap memperlakukan Sukarno dan Hatta dengan hormat. Sukarno dan Hatta pun tidak membenci golongan muda. Bahkan kemudian mereka menuruti keinginan golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa persetujuan Jepang. Mari kalian galang persatuan dan kesatuan untuk saling bermusyawarah.

1. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia

Sukarno dan Hatta akhirnya menyetujui Proklamasi Kemerdekaan segera dikumandangkan. Sukarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00, lalu menuju rumah kediaman Laksamada Maeda. Pertemuan di rumah Laksamana Maeda dianggap tempat yang aman dari ancaman tindakan militer Jepang, karena Maeda adalah Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Maeda itulah rumusan teks proklamasi disusun. Sukarni, Mbah Diro, dan BM.Diah dari golongan muda hadir dalam pertemuan itu untuk menyaksikan perumusan teks proklamasi. Berdasarkan pembicaraan antara Sukarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo, diperoleh rumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Sukarno yang berbunyi: Permasalahan muncul mengenai siapa yang harus menandatangani teks tersebut. Sukarni dari golongan muda mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Sukarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Sukarno juga diusulkan membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Sukarni diterima, kemudian Sukarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut, disertai perubahan-perubahan yang disetujui bersama.

1. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
2. Persiapan pembacaan teks proklamasi

Pagi hari tanggal 17 agustus 1945 para pemimpin nasional dan para muda kembali ke rumah masing-masing. Rakyat dan tentara Jepang menyangka bahwa pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Tentara Jepang memblokade lapangan Ikada. Pemimpin Barisan Pelopor Sudiro melihat pasukan Jepang dengan senjata lengkap menjaga ketat lapangan tersebut. Sudiro melaporkan keadaan itu kepada Muwardi, Kepala Keamanan Sukarno. Sudiro mengetahui bahwa proklamasi akan diikrarkan di rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Halaman rumah Sukarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Latif dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Sudiro memerintahkan kepada S.Suhud, untuk mencari tiang bendera. Suhud menancapkan bambu tersebut di dekat teras dan memberi tali sebagai kelengkapan untuk pengibaran bendera. Di tempat lain, Fatmawati mempersiapkan bendera yang dijahit dengan tangan. Ukuran bendera tersebut masih belum standar seperti ukuran bendera saat ini. Para muda menghendaki agar pembacaan teks proklamasi segera dilaksanakan, mereka mendesak Muwardi agar mengingatkan Sukarno untuk segera membacakan proklamasi. Akan tetapi, Sukarno menolak jika ia harus melaksanakannya sendiri tanpa Hatta. Ketegangan pun terjadi karena Muwardi terus mendesak Sukarno untuk segera membacakan teks proklamasi tanpa harus menunggu kehadiran Hatta. Untunglah lima menit sebelum pelaksanaan upacara Hatta datang dan langsung menemui Sukarno untuk segera melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia.

1. Pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan

Upacara dipimpin oleh Latief Hendraningrat tanpa protokol. Sukarno juga mempersiapkan diri, kemudian beliau menuju mikrofon. Sebelum membacakan teks proklamasi, Sukarno membacakan pidato singkat. Sukarno membacakan teks proklamasi setelah pidato singkatnya disampaikan. Latief dan Suhud mengibarkan bendera merah putih setelah pembacaan proklamasi selesai. Bendera merah putih dinaikkan dan diiringi lagu Indonesia Raya yang secara spontan dinyanyikan oleh para hadirin. Upacara ditutup dengan sambutan Wakil Walikota Suwiryo dan Muwardi. Dengan demikian, prosesi upacara proklamasi kemerdekaan selesai dilaksanakan. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat.

1. Penyebaran berita proklamasi

Kelompok pemuda yang cukup berperan dalam penyebarluasan berita proklamasi adalah kelompok Sukarni. Kelompok ini bermarkas di Bogor Lama (sekarang menjadi Jalan Dr. Sahardjo, S.H.). Sukarni dan kelompoknya berusaha mengatur strategi untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Seluruh alat komunikasi yang tersedia dipergunakan, seperti pengeras suara, pamflet, dan bahkan mobil-mobil dikerahkan ke seluruh kota Jakarta. Propaganda ini dimaksudkan pula untuk mengerahkan massa agar hadir dalam pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Penyebaran berita proklamasi tidak terbatas melalui udara, tetapi juga melalui pers dan selebaran-selebaran kertas. Peran buruh kereta api sangat besar dalam membawa berita proklamasi melalui surat-surat selebaran. Pada tanggal 20 Agustus 1945, hampir seluruh harian di Jawa memuat berita proklamasi dan UUD Negara Republik Indonesia yang baru saja dibentuk.

Materi 4: Proklamasi kemerdekaan sebagai pintu gerbang pembangunan

Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan yang dicita-citakan masyarakat Indonesia hanya dapat dilakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dapat menentukan nasib sendiri. Pada saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah Indonesia merdeka, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut.

1. Pengesahan UUD 1945. Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal, dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan.
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sukarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
3. Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusatenggara), Sumatra, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.
4. Pembentukan Kementerian. Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat Panitia Kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat Panitia Kecil mengajukan adanya 13 kementerian.
5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang akan menggantikan PPKI. Sukarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP. Seluruh anggota PPKI kecuali Sukarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
6. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Sukarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan Heiho. Pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Supriyadi (tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar) terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Urip Sumihardjo segera membentuk Markas Besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.